



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2022

Sarilamak, Juli 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya Alhamdulillah kami telah dapat menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Karena periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di kabupaten Lima Puluh Kota berakhir pada tahun 2021, maka penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005 – 2025.

Kami menyadari rancangan Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian rancangan Renja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun rancangan Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017

The image shows a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Below the signature, the name 'WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si' and the NIP number '19640404 198603 1 017' are printed.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	49
2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	64
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	78
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	92
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	93
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	95
3.3 Program dan Kegiatan	101
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	107
4.1 Rencana Kerja	107
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	107
BAB V PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Setda tahun 2019	9
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2019	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	49
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	79
Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	92
Tabel 3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	101
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Tahun 2022	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Dokumentasi rapat koordinasi bersama aparatur dan pemerintah	27
Gambar 2 Dokumentasi penyerahan Bantuan hibah.....	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun Nomor 140 Tahun 2011.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, perencanaan adalah tahapan awal yang akan menentukan hasil akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan. Program/kegiatan yang direncanakan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal dan tidak jauh meleset dari yang diharapkan oleh pelaksana.

Terkait dengan perencanaan program/kegiatan pembangunan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 7 ayat 2 (dua) di katakan bahwa “ Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- I. Persiapan penyusunan;

Mengadakan orientasi penyusunan Renja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian dan Kasubag yang terkait dengan perencanaan pada bagian masing- masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.

II. Penyusunan ;

Pada awal bulan November 2020 sudah dilaksanakan berbagai sosialisasi mengenai persiapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah oleh tim penyusun pada sub bagian Penyusunan Program Bagian Keuangan. Pada Akhir bulan Oktober 2020 sudah dilaksanakan rapat Sinkronisasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, yang antara lain dengan agenda sejauh mana perkembangan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja dimaksud. Penyusunan Renja mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan rancangan;

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Penyajian Rancangan Renja Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Renja.

IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang nanti akan diatur oleh Bapelitbang, yang akan dihadiri oleh

pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. perumusan rancangan akhir;

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. penetapan.

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yakni sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara).

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen Perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara ;
5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Rencana kerja 2022 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun periode dimaksud.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan Renja ini adalah:

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu- isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang Tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada tahun 2022 serta pendanaan kegiatan pada masing- masing Bagian di Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, kaidah- kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut penyusunan renja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 15) pada tahun anggaran 2020, memiliki 31 (Tiga puluh satu) Program yang diwujudkan dengan 90 (Sembilan puluh) kegiatan. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah.

Secara umum pelaksanaan Program/ kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh sampai pada Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi yang memuat capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terlihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Nasional.	-	3,1500	*	*
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan produk Hukum yang ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	67	66,57	99,35%
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75	82,76	110,34%
		Persentase Koordinasi Sektor Perekonomian	90%	90%	100%	100%
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai aturan perundang undangan.	-	90%	94,81%	118%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
		Persentase Masjid/Mushalla/Surau/MDA/TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	-	7,70 %	6,59 %	85,54%
		Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase kerjasama yang terfasilitasi	-	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	-	67	66,57	99,35%
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	100%

*) = belum ada data penilaian

Untuk lebih rinci yang menampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggaran, dapat dilihat pada *Tabel T-C.29*

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
SEKRETARIAT DAERAH
s.d Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 03 30	3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
20 03 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan:	<u>Outcomes:</u> Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 23 01	1. Penyusunan system informasi terhadap layanan public	<u>Output:</u> Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan (PATEN)	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 23	2. Pendidikan dan pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 27	Program penataan otonomi daerah Kegiatan:	<u>Outcomes:</u> Tersedianya daerah yang tertata pemerintahan dan dan daerahnya sesuai dengan peruntukan	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	60%	5 paket	95%
20 03 27 03	1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	<u>Output:</u> Terlaksananya pelacakan, penegasan, dan penepatan tapal batas diwilayah kabupaten lima puluh kota	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	50%	5 paket	100%
20 03 30	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan:	<u>Outcomes:</u> Terwujudnya peningkatan pemahaman kapasitas aparatur kecamatan	5 kegiatan	2 kegiatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	5 kegiatan	100%
20 03 30 03	1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	<u>Output:</u> Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	5 kegiatan	3 kegiatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	4 kegiatan	100%
20 03 31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan:	<u>Outcomes:</u> Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada aparatur pemerintah kecamatan	5 kegiatan	5 kegiatan	13 camat	13 camat	100%	100%	5 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 03 31 17	1. Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi	<i>Output:</i> Penghargaan bagi camat berprestasi	5 kegiatan	3 kegiatan	13 camat	13 camat	100%	100%	4 kegiatan	80%
20 03 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan:	<i>Outcomes:</i> Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum	100%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%
20 03 16 01	1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<i>Output:</i> Terlaksananya penyediaan tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum	100%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%
20 03 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan:	<i>Outcomes:</i> Terlaksananya kasus-kasus pertanahan	4 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0%	0%	0 kasus	0%
20 03 17 01	1. Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	<i>Output:</i> Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	4 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0%	0%	0 kasus	0%
2. BAGIAN HUKUM										
20 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	90%
20 03 26 01	Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah khusus yang difasilitasi penyelesaiannya	3 Kasus	15 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100	4 Kasus	24 Kasus	90%
20 03 26 02	Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah rancangan peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	35 peraturan bupati dan 135 keputusan bupati	50 peraturan bupati dan 310 keputusan bupati	57 peraturan bupati dan 278 keputusan bupati	57 peraturan bupati dan 278 keputusan bupati	100	30 peraturan bupati dan 130 keputusan bupati	137 peraturan bupati dan 718 keputusan bupati	85%
20 03 26 03	Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah rancangan Perda yang dikaji	16 rancangan peraturan daerah	24 rancangan peraturan daerah	3 rancangan peraturan daerah	3 rancangan peraturan daerah	100	14 rancangan peraturan daerah	41 rancangan peraturan daerah	2,6
20 04 27 04	Kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah nagari dan aparatur pemerintahan yang diberikan penyuluhan hukum	25 nagari dan 750 aparatur pemerintah	32 nagari dan 805 aparatur pemerintah	10 nagari dan 325 aparatur pemerintah	10 nagari dan 325 aparatur pemerintah	100	20 nagari dan 600 aparatur pemerintah	62 nagari dan 1.880 aparatur pemerintah	2,5
20 05 28 05	Kegiatan publikasi	Jumlah produk	100 buku	320 buku	80 buku	80 buku	100	90 buku	490 buku	4,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	peraturan peundang-undangan	hukum yang dipublikasikan	peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan		peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	
20 06 28 17	Kegiatan evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari	Jumlah rancangan produk hukum nagari yang di evaluasi	90 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	180 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	512 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	512 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	100	85 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	777 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	8,6
20 06 28 18	Kegiatan diseminasi aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang mengikuti diseminasi	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	180 aparatur pemerintah dan masyarakat	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	100	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	300 aparatur pemerintah dan masyarakat	5,0
3. BAGIAN ORGANISASI										
01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Setda	75	70	67	66,57	99,35%	80	-	
01 01 06 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LKJP dan PK	Nilai A	Nilai CC	Nilai B	Nilai CC	-	Nilai BB	Nilai CC	-
01 01 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
01 01 26 07	Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM	Jumlah SKPD yang dimonitoring	Dokumen SPM	Dokumen SPM	Dokumen SPM	Dokumen SPM	100%	Dokumen SPM	100%	100%
01 01 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase tersusunnya dokumen analisis dan evaluasi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01 01 31 06	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	100%	Dokumen Anjab	1007%	100%
01 01 31 18	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	100%	Dokumen Evjab	100%	100%
01 01 35	Program Reformasi Birokrasi	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan	3 Peraturan yang telah disosialisasikan	1 peraturan perundang-undangan	1 Peraturan Perundang-undangan	100%	Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
			asikan								
01	01 35 01	Kegiatan Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Ranperda(Perda) dan Ranperbup(Perbup) tentang Tupoksi	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	100%	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	100 %	90 %
01	01 35 02	Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan SOP	Jumlah Monitoring ke SKPD yang menerapkan SPP dan SOP dan Bimtek SOP	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	100 %	90 %
01	01 35 06	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Sosialisasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	100 %	90 %
01	01 35 07	Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Perbup tentang Tata Naskah Dinas(Ketatalaksanaan)	Perbup	Perbup	Perbup	Perbup	100%	Perbup Tata naskah Dinas	100 %	90 %
4. BAGIAN KERJASAMA DAN MINBANG											
1	01 01 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kesepakatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam rangka peningkatan sektor ekonomi	90 %	93,75 %	86 %			88 %		
20	3 25 02	Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan sektor ekonomi	10 MoA/MoU	4 MoU	4 MoU	7 MoU	175%	10 MoA/MoU	-	-
20	3 25 05	Kegiatan Koordinasi kerjasama Pembangunan Antar Daerah	- Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.	4 MoA	4 MoU	4 MoU	22 MoU	550%	4 MoA	-	-
20	3 25 06	Kegiatan Fasilitasi/Pembentuk	- Tercapainya kesepakatan atas dasar	8 MoA	4 MoU	4 MoU	4 MoU	100%	8 MoA	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	an kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah maupun pihak ketiga											
20	3	25	07	Kegiatan Pendataan Perantau Minang di Nagari	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam pendataan perantau	34 Nagari	-	20 Nagari	4 Kecamatan 25 Nagari	100%	34 Nagari	-	-
20	3	25	08	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Terlaksananya pembentukan nagari Binaan Kerjasama Rantau	15 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	100%	25 Nagari	-	-
20	3	25	09	Kegiatan Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Terlaksananya pertemuan pertemuan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dengan perantau minang	8 MoU/ MoA	-	4 MoU/ MoA	4 MoU/ MoA	100%	5 MoU/ MoA	-	-
01	01	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tersedianya bahan informasi Up to date tentang pelaksanaan program/ kegiatan bagi KDH	93 %		91 %			92 %		
01	01	20	36	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Himpunan Rekapitulasi capaian/ kemajuan program/ kegiatan SKPD per-bulan	96 buku		96 buku	96 buku	100%	96 buku		
01	01	20	09	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Sistem Pengendalian Intern	Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020	1 Perbub		1 buku	1 buku	100%	1 buku		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
1	20 20	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>									
1	2 20 20	Kegiatan Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa	Tersedianya format-format yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa	10 format	18 format	1 format	1 format	100%	2 format	20 format	200%
1	2 20 33	Kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97%	100 %	80 paket	89 paket	111,25%	100 %	100%	100%
1	2 20 34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa	Laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	16 laporan	80%
1	2 20 35	Kegiatan Penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa	Terfasilitasinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa	50 masalah	30 masalah	10 masalah	10 masalah	100%	10 masalah	40 masalah	80%
1	2 30	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>									
1	2 30 05	Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	10 bimtek/ diklat	4 bimtek/ diklat	1 bimtek	3 bimtek	300%	2 bimtek	9 bimtek	90%
6. BAGIAN PEREKONOMIAN											
1	2 17 0	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase terpenuhinya penyusunan dok evaluasi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2 17 0 18	Kegiatan Monitoring,	Terwujudnya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Evaluasi dan Pelaporan	koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan dan konservasi SDA											
1	2 0	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%		
1	2 0	16	05	Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	7 event	7 event	2 event	2 event	100%	5 event	95%	95%	
1	2 0	30	07	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	- Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi dan UKM	35 PKP RI	35 PKP RI	30 PKP RI	30 PKP RI	100%	32 PKP RI	95%	95%
1	2 0	15		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	
1	20	15	04	Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm	Terlaksananya koordinasi dan	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	100%	6 BPR, 2 BUMD	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	pengendalian investasi PMDN/ PMA	pengawasan BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta											
1	20	15											
	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%			
1	20	15	02	Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	500 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	95%	95%	
1	20	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	15	04	kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Terlaksananya koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	100%	5 Kegiatan/ Rakor	100%	100%
1	20	17		Program pengembangan kemitraan	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	05	Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
1	20	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	20	15	03	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terwujudnya koodinasi dgn OPD terkait pemanfaatan dana DBHCHT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
1	20	15		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	15	06	Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	-jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
7. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
x	xx	01		Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi								
x	xx	01	01	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Jumlah kafilah yang terfasilitasi untuk mengikuti even MTQ Nasional Tk Provinsi	3 kali MTQ Tk Kab. dan 3 kali MTQ provinsi	Fasilitasi terhadap kafilah Kab. Lima Puluh Kota untuk even MTQ Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Fasilitasi terhadap kafilah Kab. Lima Puluh Kota untuk even MTQ Provinsi	-	80%
x	xx	01	02	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi	33 kali	10 kali	5 kali	5 kali	100%	6 kali	6 kali	63,64%
x	xx	01	03	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai	71 LDS	15 LDS	14 LDS	14 LDS	100%	14 LDS	14 LDS	46,48%
x	xx	02		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi								
x	xx	02	01	Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari	461 masjid	145 masjid	79 masjid	79 masjid	100%	79 masjid	79 masjid	65,72%
x	xx	03		Program Pengembangan Nilai Budaya									
x	xx	03	01	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	1.882 orang	493 orang	797 orang	797 orang	100%	355 orang	1.152 orang	61,21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
x	xx	03	02	Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan	Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Gharin Masjid	18.025 orang	5865 orang	3000	2972 orang	99,07%	3010 orang	6010 orang	65,82%
x	xx	04		Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pembinaan kelembagaan masyarakat								
x	xx	04	01	Pelaksanaan pembinaan dan lomba-lomba UKS	Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi	336 sekolah	112 sekolah	56 sekolah	56 sekolah	100%	56 sekolah	-	66,67%
x	xx	04	02	Koordinasi dan peningkatan jejaring kerjasama stakeholder kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat	48 kali	15 kali	7 kali	7 kali	100%	7 kali	2 kali	60,42%
x	xx	04	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terselenggara	132 kali wirid, 132 kali senam	44 kali wirid, 44 kali senam	22 kali wirid, 22 kali senam	20 kali wirid, 17 kali senam	84,09%	18 kali wirid, 18 kali senam	6 kali wirid, 6 kali senam	94,32%

8. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

1	01	01		Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	85%	90%	90%	100%	95%	84,5%	100%
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Persentase terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik, dan telepon	100%	85%	90%	90%	100%	95%	78,5%	100%
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya alat kebersihan kanto	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85,5%	100%
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	86,5%	100%
1	01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentasenya terpenuhinya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat-rapat	100%	85%	90%	90%	100%	95%	88,5%	100%
1	01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Persentase terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	73,5%	100%
1	01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	Persentase terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Setda	100%	85%	90%	90%	100%	95%	77%	100%
1	01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH / WKDH	100%	85%	80%	80%	100%	100%	79,75%	100%
1	01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi	6 unit	4 unit	-	-	100%	5 unit	5 unit	100%
1	01 02 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase terpenuhinya peralatan rumah jabatan / dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	81%	100%
1	01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	70,5%	100%
1	01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Persentase terpenuhinya mebeleur kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85,5%	100%
1	01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%
1	01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	71,5%	100%
1	01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	100%	85%	90%	90%	100%	95%	88,5%	100%
1	01 02 26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	89,5%	100%
1	01 02 40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74,5%	100%
1	01 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%
1	01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%
1	01 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%
1	01 16 02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 kali	-	15 kali	8 kali	55%	5 kali	15 kali	100%
1	01 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%
1	01 16 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 kali	-	15 kali	15 kali	100%	15 kali	20 kali	100%
	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	85%	90%	90%	100%	95%	68,67%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019					
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Persentase terpenuhinya layanan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen	100%	85%	90%	90%	100%	95%	78,5%	100%			
	05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan inspeksi KDH / WKDH	100%	85%	90%	90%	100%	95%	80%	100%			
1	01	16	08	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)	Jumlah terikutinya kegiatan peningkatan kapasitas KDH / WKDH (Lemhanas)	6 orang	6 orang	6 orang	0 orang	0%	6 orang	6 orang	100%	
1	01	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20,28%	20,28%
1	01	05	06	Bimbingan teknis keprotokolanan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	-	-	
9. BAGIAN KEUANGAN														
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	85%	90%	74%	80,74%	95%	84,5%	100%	
1	20	02	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pengelola Administrasi Keuangan yang terbayarkan honorinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah			7	9,42	134%				
1	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1 dokumen	100%	
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terwujudnya laporan keuangan setda yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
10. BAGIAN HUMAS DAN PEMBERITAAN													
20	10	16	09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ WKDH	Persentase pelaksanaan kegiatan kepala daerah/wakil kada sesuai dengan aturan yg berlaku, terlaksananya tata keprotokolan baik di dalam maupun di luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Layanan Keprotokolan KDH/Wakil KDH	Terselenggaranya kegiatan kepala daerah/Wakil kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	20	30	06	Program : Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur terhadap aturan keprotokolan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	100%
				Bimbingan Teknis Keprotokolan	Terseelenggaranya bimbingan teknis keprotokolan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	100%	100%
20	10	15	20	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	100%	90%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan	100%	100%
20	10	15	02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase terpublikasinya kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda.	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	100%	Persentase terpublikasinya a kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda.	14,23%	14,23%
20	10	18		Program Kerjasama Informasi dan Media	Pesentase kegiatan pemerintah daerah yang						Pesentase kegiatan pemerintah daerah		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019			
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Massa	terpublikasikan						yang terpublikasikan				
20	10	18	01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	100%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik	18,08%	18,08%
20	10	18	02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab " Tabloid Sinamar" serta pemberitaan daerah di media cetak dan elektronik	12 Kali Cetak / 1.000 eks	12 Kali Cetak / 1.000 eks	12 Kali Cetak / 1.000 eks	100%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab " Tabloid Sinamar	9,57%	9,57%
20	10	18	03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tersebar nya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk/baliho pembangunan	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	100%	Tersebar nya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk/baliho pembangunan	17,62%	17,62%

Untuk evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu pada masing- masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian PUM

Pada tahun anggaran 2020, Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) memiliki 5 (lima) program yang diwujudkan dalam 8 (delapan) kegiatan, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah, Koordinasi Antar Lembaga, serta Otonomi Daerah. Pengurangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum sampai pada tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun berjalan hingga bulan Oktober di angka 75,36%. Realisasi ini dicapai karena ada beberapa kegiatan yang berada pada aliran Kas bulan November dan Desember 2020.



(Gambar 2 : Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama aparatur dan pemerintahan mengenai batas daerah)

2. Bagian Hukum

Pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 288.100.000,-
- Realisasi Kegiatan :

- a. Realisasi keuangan Rp. 288.100.000,- (100%)
- b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.100.000,- dan realisasi keuangan Rp. 288.100.000,- (100 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 121.587.750,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 119.189.103,- (98,03 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.587.750,- dan realisasi keuangan Rp. 119.189.103,- (98,03 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah seperti Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

3. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 169.183.125,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 1168.203.800,- (99,42 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.183.125,- dan realisasi keuangan Rp. 1168.203.800,- (99,42 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai

100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Perumusan dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan penyusunan rencana legislasi Daerah.

4. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 239.966.700,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 238.857.530,- (99,54 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.966.700,- dan realisasi keuangan Rp. 238.857.530,- (99,54 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyuluhan hukum terhadap Aparatur Pemerintahan Nagari.

5. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 89.325.100,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 87.746.000,- (98,23 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.325.100,- dan realisasi keuangan Rp. 87.746.000,- (98,23 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pusat dan Daerah.

6. Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 82.686.000,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 81.951.600,- (99,11 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.686.000,- dan realisasi keuangan Rp. Rp. 81.951.600,- (99,11 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terevaluasinya dan terawasinya produk hukum nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kegiatan Desiminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM)

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 69.415.300,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 67.845.900,- (97,74 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Desiminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.415.300,- dan realisasi keuangan Rp. 67.845.900,- (97,74 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya kemajuan dan penegakan HAM tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

3. Bagian Organisasi

Pada tahun anggaran 2019, Bagian Organisasi melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada tiga sub bagian yang ada di Bagian Organisasi. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang berada diangka 97,18%, dengan rincian :

- Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dengan anggaran sebesar Rp. 153.252.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.533.100,- (97,57%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan

- Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.944.200,- (99,96%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen evaluasi jabatan
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 175.688.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.237.000,- (96,90%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kegiatan Restrukturisasi penataan tugas dan fungsi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 146.318.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.888.492,- (93,56%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Peraturan daerah dan Peraturan bupati tentang Perubahan OPD
- Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 61.240.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.209.000,- (99,95%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 101.660.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.059.500,- (91,54%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring bidang reformasi birokrasi
- Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SPM dengan anggaran sebesar Rp. 99.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.740.300,- (99,66%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring penerapan SPM kepada SKPD
- Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 111.212.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.192.282,- (99,98%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari

kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring penerapan SPP dan SOP pada SKPD

4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Pada tahun anggaran 2020, Bagian Kerjasama dan Adm. Pembangunan memiliki 2 (dua) Program yang diwujudkan dengan 3 (tiga) sub kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada delapan kegiatan yang ada di Bagian Kerjasama dan Adm. Pembangunan yaitu Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah, Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau dan Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan diatas 100% dari target yang direncanakan, dengan rincian pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi dengan realisasi kinerja 175% dimana dari target 4 MoU yang direncanakan dapat tercapai 7 MoU kerjasama yang disepakati, Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dengan realisasi kinerja 550% dan Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan realisasi kinerja 100%. Seterusnya Kegiatan Pembentukan dan pembinaan kerjasama Rantau 100 %, Pendataan Perantau Kab. Lima Puluh Kota 100%, Pembuatan Jaringan Komunikasi antar daerah dan perantau 100%, Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penyelenggaraan dan pengaturan system pengendalian intern APBD 95,11% serta kegiatan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan APBD 100%%

Namun pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kerjasama ditahun 2019 bukan tanpa kendala, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan diantaranya masih adanya Kerjasama yang tidak dapat

difasilitasi dan kegiatan pembentukan jaringan komunikasi dengan rantau yang belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang kerjasama daerah;
2. Adanya perbedaan peraturan kerjasama pada kementerian yang bersifat teknis, sehingga kerjasama belum dapat dilaksanakan; dan
3. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk Bagian Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing- masing sub bagian.
4. Kegiatan yang ada belum mendukung sepenuhnya tugas dan fungsi masing-masing sub bagian yang ada.

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Evaluasi pelaksanaan renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa tahun lalu hanya bisa dilaksanakan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang sedang berjalan hanya dijadikan acuan dan dasar dalam penyusunan renja tahun 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran 2019 terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 457.662.990,. Semua program dan kegiatan ini dapat direalisasikan sesuai dengan target keluaran dan kinerja yang telah ditetapkan dimana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 20.632.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.783.000,- (71,65%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur/SOP yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Realisasi keuangan yang berada

di bawah 80% ini disebabkan oleh adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran sehingga bisa melakukan penghematan tanpa mengurangi keluaran dari pelaksanaan kegiatan.

- Kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 359.993.640,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 332.572.700,- (92,38 %). Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender sebanyak 83 paket.

- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 36.579.150,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 35.109.500,- (95,98%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan paket-paket yang telah ditender sebelumnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

- Kegiatan penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 20.442.200,-. Dalam perkembangannya kegiatan ini tidak memerlukan anggaran karena permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak memerlukan fasilitasi lebih lanjut baik dalam bentuk rapat koordinasi ataupun konsultasi ke tingkat propinsi ataupun tingkat pusat.

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pelatihan, bimtek dan workshop ULP

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 20.015.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 15.037.500,- (75,13%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terikutinya bimtek sebanyak 2 kali oleh 4 personil. Serapan anggaran yang berada di bawah 80% disebabkan oleh adanya bimtek yang dilaksanakan masih dalam propinsi Sumatera Barat sehingga tingkat realisasi berada di bawah perencanaan

Mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang/Jasa baru terhitung efektif dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya pada bulan April 2019, oleh karena itu evaluasi dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah dalam bentuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2018 yang selanjutnya dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa
- b. Kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa
- d. Penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari satu kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP

Dari 5 (lima) kegiatan tersebut dengan total dana Rp 592.170.200,- dapat direalisasikan sesuai dengan target keluaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih detailnya realisasi dari program dan kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 42.298.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.781.500,- (84,59%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur/SOP yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

- b. Kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 320.026.200,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 300.229.840,- (93,81 %). Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender sebanyak 80 paket.

c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 50.838.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 45.443.000,- (93,81%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan paket-paket yang telah ditender sebelumnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

d. Kegiatan penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 95.965.000,-. dan dapat direalisasikan sebesar Rp 93.080.000,- (96,99%).

e. Kegiatan pelatihan, bimtek dan workshop ULP

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 50.711.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 48.989.765,- (96,61%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terikutinya bimtek sebanyak 2 kali oleh 4 personil.

6. Bagian Perekonomian

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. *Selama tahun 2019 seluruh program dan kegiatan yang ada pada Bagian Perekonomian tidak ada yang tidak memenuhi target.*
- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah

sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Koordinasi dalam rangka konsultasi, monitoring dan rapat-rapat permasalahan konservasi SDA yang direncanakan adalah sebanyak 6 laporan dengan realisasi pencapaiannya sebanyak 6 laporan atau dengan kata lain realisasinya sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan tersebut maka tingkat pelaksanaan perencanaan telah terwujud.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Dalam rangka promosi produk unggulan daerah dan promosi produk UKM direncanakan adalah sebanyak 2 event pameran, realisasi adalah sebanyak 2 event pameran atau dengan realisasi sebesar 100%.
- Pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan terhadap anggota PKP-RI yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1 kali sosialisasi dengan peserta sebanyak 30 PKP-RI, realisasi pencapaiannya adalah 1 kali sosialisasi dengan peserta sebanyak 30 PKP-RI atau dengan realisasi 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.

3. Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi dalam 1 tahun adalah sebanyak 12 laporan, realisasi

pencapaiannya adalah 12 laporan atau dengan realisasi 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.

4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 80%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 80%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR sesuai peraturan perundang-undangan direncanakan sebanyak 6 BPR dan 2 BUMD, realisasi pencapaiannya adalah 6 BPR dan 2 BUMD atau realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
5. Program pengembangan data/ informasi/ statistic daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Pembuatan buku ekonomi daerah yang direncanakan sebanyak 100 buku yang dicetak, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 100 buku atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Koordinasi dan pemantauan terhadap permasalahan tentang hasil tambang yang ada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan adalah sebanyak 7 kegiatan/rakor, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 7 kegiatan/rakor atau dengan

realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud

7. Program pengembangan kemitraan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain

- Koordinasi dan pemantauan terhadap obyek wisata yang ada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan adalah sebanyak 1 laporan, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 1 laporan atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud

8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain

- Fasilitasi kegiatan sosialisasi yang direncanakan sebanyak 5 kali sosialisasi, dengan realisasi sebanyak 5 kali sosialisasi atau dengan realisasi sebesar 100%.
- Koordinasi dan pemantauan terhadap penggunaan dana DBH-CHT dan pupuk dan pestisida bersubsidi yang beredar di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan sebanyak 2 laporan, dengan realisasi pencapaiannya adalah 2 laporan atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud

9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, direncanakan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi adalah sebanyak 3 OH, realisasi pencapaiannya adalah 3 OH atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
- Penyediaan Rapat koordinasi tentang Inflasi Daerah, direncanakan rapat koordinasi sebanyak 2 laporan, realisasi pencapaiannya adalah 2 laporan, atau dengan kata lain tingkat realisasinya adalah sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan dimaksud maka pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi oleh Bagian Perekonomian telah terwujud.

III. Pada tahun 2019, tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel 2.1 diatas juga dapat dijelaskan hasil evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi pencapaian renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2019. Dikarenakan tahun 2019 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra, maka pencapaian target program/kegiatan seharusnya telah mencapai kondisi 70%. Berikut dijelaskan program/kegiatan tingkat pencapaiannya dibawah, sama dengan dan besar dari 70%, sebagai berikut:

1. Program-program yang telah mencapai target 70% atau lebih antara lain:
 - Untuk program dari bagian perekonomian belum ada yang mencapai 70% atau lebih, dikarenakan kegiatan belum berjalan sesuai rencana disebabkan keterlambatan pencairan dana.
2. Program-program yang belum mencapai target 50% atau lebih antara lain:
 - Untuk program dari bagian perekonomian belum ada yang mencapai 70% atau lebih, dikarenakan kegiatan belum berjalan sesuai rencana penyebabnya dana belum cair.

7. Bagian Kesra

1. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.87.286.500,- dan realisasi keuangan Rp. 1.075.781.672,- atau 98,94% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya MTQ Tingkat Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Terfasilitasinya peserta MTQ Nasional dari Kab. Lima Puluh Kota.

Dengan capaian kinerja adalah lahirnya qori dan qori'ah yang berprestasi dan tumbuhnya minat mempelajari Al Quran di masyarakat.

2. Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.932.500,- dan realisasi keuangan Rp. 43.394.623,- atau 74,91% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya pembinaan terhadap pembimbing dan peserta lembaga didikan subuh;
- b. Terlaksananya pembinaan lembaga didikan subuh;
- c. Terlaksananya lomba didikan subuh tingkat Kab. Lima Puluh Kota (13 Kecamatan);
- d. Ikut sertanya Kab. Lima Puluh Kota pada lomba didikan subuh tingkat Prov. Sumatera Barat.

Dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya pembinaan dan penilaian didikan subuh, anak-anak didikan subuh yang berakhlak mulia, cinta masjid dan pandai tulis baca Al Quran. Realisasi Kegiatan Terlaksana 100% tanpa ada hambatan yang berarti, namun secara anggaran tidak terserap seluruhnya karena pada rekening perjalanan dinas dalam daerah ada beberapa anggota tim penilai yang tidak dapat pergi melaksanakan penilaian LDS, sehingga terjadi sisa dana pada rekening dimaksud.

3. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.327.500,- dan realisasi keuangan Rp. 63.042.810,- atau 89,64% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Kab. Lima Puluh Kota yaitu :
 - a. Penyelenggaraan malam takbiran dan Sholat Hari Raya Idul Fitri;
 - b. Penyelenggaraan malam takbiran dan Sholat Hari Raya Idul Adha;
 - c. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
 - d. Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
 - e. Peringatan 1 Muharram (Tahun Baru Hijriyah)

Dengan capaian kinerja akan semaraknya syiar agama Islam di Kab. Lima Puluh Kota.

II. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

1. Kegiatan Safari Ramadhan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.345.000,- dan realisasi keuangan Rp. 200.345.594,- atau 89,70% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten dan Provinsi ke Masjid-Mesjid di Kab. Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja antara lain :
 - a. Terjalinnnya silaturahmi antara Pemkab Lima Puluh Kota dengan masyarakat;
 - b. Tertampungnya aspirasi masyarakat secara langsung.

III. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama stakeholders usaha kesejahteraan sosial masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.831.000,- dan realisasi keuangan Rp. 31.495.543,- atau 87,90% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi antar pelaku-pelaku jejaring pengaman sosial, dengan capaian kinerja terkoordinasinya kegiatan

pada Bagian Kesra dengan stakeholders terkait (Kabupaten, Provinsi dan Pusat).

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.200.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.500.00,- atau 84,05% dengan realisasi fisik mencapai 86,36%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya wirid dan senam pagi, dengan capaian kinerja meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani.
3. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.786.000,- dan realisasi keuangan Rp. 85.389.100,- atau 82,37% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba sekolah sehat Tingkat Kab. Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan Terkirimnya Sekolah sehat untuk Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

IV. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369.178.000,- dan realisasi keuangan Rp. 259.212.790,- atau 70,21% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlayannya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji serta TPHD Kab. Lima Puluh Kota. Capaian kegiatan yang hanya 70%, hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya dana ONH TPHD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019. Sudah disetor ke Kas Daerah namun tetap menjadi sisa dana karena adanya pembayaran kembali oleh TPHD.
2. Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.174.500,- dan realisasi keuangan

Rp. 2.433.434.109,- atau 99,32% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses pembelajaran terhadap abak didik di Surau, TPQ dan MDTA, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pemahaman anak didik di Surau, TPQ dan MDTA tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau.

8. Bagian Umum

Selama Tahun 2019, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan dengan total Dana Rp. 14.180.828.000,- dari 25 kegiatan yang dilaksanakan, dengan realisasi kinerja hampir semua kegiatan 100 % sesuai dengan hasil seperti yang diharapkan. Baik dari segi pelayanan administrasi secara umum, perlengkapan, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan penyediaan mobilitas maupun pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Secara umum pelaksanaan Program / Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan sampai Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang berada di angka 100 %. Namun ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu Kegiatan Peningkatan kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (Lemhanas) hal ini disebabkan tidak adanya undangan permintaan kegiatan peningkatan kapasitas KDH/WKDH dimaksud.

Untuk Tahun 2021, Bagian Umum dan Perlengkapan masih terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tata usaha, pengadaan, kepegawaian, perjalanan dinas, keprotokolan, perlengkapan, serta penyelenggaraan rumah tangga lingkup Sekretariat Daerah dan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

9. Bagian Keuangan

Pada tahun anggaran 2020, Bagian Keuangan memiliki 2 (dua) Program yang diwujudkan dengan 3 (tiga) kegiatan. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tiga sub bagian yang ada di Bagian Keuangan yaitu Sub Bagian Anggaran, Perbendaharaan dan sub bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Secara umum pelaksanaan Program/ kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik.

9	Bagian Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	33,136,000	29,562,227	1,675,000	31,237,227	94,27
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	768,594,000	427,240,103	25,540,000	452,780,103	58,91
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16,753,000	16,390,000	-	16,390,000	97,83
		Jumlah	818,483,000	473,192,330	27,215,000	500,407,330	61,14

Dengan total anggaran sebesar Rp. 818.483.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 782,607.837,- (95,62%). Capaian Kegiatan tersebut yaitu : Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi keuangan kepada pelaksana penatausahaan keuangan, terwujudnya Dokumen perencanaan dan Pelaporan keuangan Sekretariat Daerah

Untuk tahun 2020, Bagian Keuangan akan terus berupaya melakukan optimalisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terutama berkaitan dengan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan Pelaporan Keuangan sehingga pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan optimal.

10. Bagian Humas dan Pemberitaan

Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,78%, sehingga tingkat realisasi adalah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan fungsi humas di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sasarannya agar terjalinnya komunikasi yang baik antara Bagian Humas dan Pemberitaan dengan humas-humas yang ada di setiap OPD.
 - Pengisian informasi di web limapuluhkotakab.go.id khususnya Bagian Humas dan Pemberitaan agar informasi-informasi kegiatan pemerintah daerah dan informasi pembangunan bisa disampaikan ke masyarakat luar secara cepat.
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, dan tingkat realisasi nya juga 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Bagian Humas dan Pemberitaan sebagai lembaga pengelola informasi di tingkat kabupaten menjembatannya melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan media cetak/elektronik serta online yang beredar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kerjasama ini dalam bentuk kontrak kerjasama dalam satu tahun yang berisikan poin-poin kerjasama yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bagian Humas dan Pemberitaan hanya memfasilitasi media yang mau mengikuti aturan yang telah dijelaskan di dalam kontrak kerjasama tersebut. Kegiatan ini berjalan sesuai yang ditargetkan, yaitu 100%.

- Bagian Humas dan Pemberitaan melaksanakan kegiatan memberi informasi kegiatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui media cetak/elektronik dan online. Bagian Humas dan Pemberitaan setiap hari membuat pers rilis kegiatan Kepala Daerah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan kebijakan daerah dan dikirimkan ke media cetak/elektronik dan online melalui wartawan yang bertugas di Lima Puluh Kota. Sehingga , setiap kegiatan serta kebijakan daerah dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum melalui media cetak/elektronik yang beredar di Lima Puluh Kota maupun media online yang bisa diakses oleh masyarakat dimana saja. Indikator kegiatan ini dapat tercapai 100 % karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Bagian Humas dan Pemberitaan dengan wartawan media cetak/elektronik dan online.
- Kegiatan Jumpa Pers dimaksudkan untuk terpublikasinya informasi yang benar dan seimbang kepada masyarakat agar hilangnya asumsi-asumsi yang tidak benar atas pemberitaan dan penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan ini menjadi sarana klarifikasi dan jumpa pers atas pemberitaan antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wartawan sebagai awak media yang dapat meluruskan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan. Kegiatan klarifikasi dan jumpa pers atas pemberitaan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan kebijakan publik sehingga mengarah pada hasil yang diharapkan yaitu terciptanya pelayanan informasi yang benar dan seimbang. Kegiatan ini dapat terlaksana 100%

- Pelaksanaan kegiatan peliputan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun di luar Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara maksimal yaitu 100%.

b) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Humas dan Pemberitaan sebagai lembaga pengelola informasi di tingkat kabupaten menjembatannya melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Agar penyebarluasan informasi ini dapat berjalan secara efektif, efisien serta menjangkau banyak wilayah, maka dilaksanakan melalui penerbitan media internal Kabupaten Lima Puluh Kota “Tabloid Sinamar” yang dikelola oleh Bagian Humas dan Pemberitaan.

Indikator kinerja ini dapat terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 100%. Hal ini didukung oleh ketersediaan dana serta pengelolaan yang baik oleh Bagian Humas dan Pemberitaan.

- Pelaksanaan kegiatan peliputan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun di luar Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara maksimal yaitu 100%.

c) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

- Dokumentasi seluruh kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar daerah dalam bentuk foto-foto kegiatan serta penghimpunan data informasi dari media cetak dalam bentuk kliping sehingga terwujudnya arsip daerah tentang pemberitaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di media cetak dalam bentuk buku kliping. Selain itu Bagian Humas dan Pemberitaan juga memakai aplikasi E-kliping untuk penyimpanan data kliping Koran berbasis elektronik.

Tujuan dari kliping elektronik dapat membuat pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan

yang terjadi misalnya dalam melakukan pengklipingan jumlah informasi berita pada Bagian Humas dan Pemberitaan.

Kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu terlaksana 100%.

- Penyebarluasan informasi melalui spanduk / baliho penyampaian informasi yang dapat dicapai 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang disesuaikan dengan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1 (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta umum

2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh PD
4. Pelayanan Teknis Administratif Kepala Daerah dan seluruh PD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dilihat dari kinerja pelayanan kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta pengembangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dilakukan, yang mencakup hal- hal positif yang berhasil ditingkatkan, masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan dan kondisi/ prediksi pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan ke depan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 terdapat IKU Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/ Bagian Kesejahteraan Rakyat, yaitu “ Meningkatkan Aktifitas Masjid/Mushalla/surau/ MDA/ TPQ.

Berdasarkan hal tersebut, capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7.27%	7.42%	7.55%	7.70%	7.85%	7.90%	7.27%	7.42%	6.82%	6.59%	7.85%	7.90%	Capaian realisasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran Hibah

Pada tahun 2019 target Masjid/ Mushalla yang akan diberi bantuan sebanyak 73 unit dari 1334 unit atau sekitar 7,70 % dari jumlah Masjid/ Mushalla yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota.



(Gambar 3. Foto Dokumentasi Penyerahan Bantuan hibah untuk masjid di Nagari Andaleh Kec. Luak pada acara Safari Ramadhan)

Secara rinci Masjid yang dibantu berjumlah sebanyak 73 Masjid, dimana bantuan ini diserahkan bersamaan dengan momen safari ramadhan sebanyak 68 Masjid dan diluar kegiatan safari ramadhan sebanyak 5 Masjid. Sedangkan jumlah Mushalla yang dibantu sebanyak 15 Mushalla, 8 Mushalla pada saat safari ramadhan dan 7 mushalla diluar kegiatan safari ramadhan. Adapun jumlah anggaran yang terealisasi untuk bantuan hibah Masjid/ Mushalla mencapai Rp.1.158.000.000,-

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

Sekretariat Daerah yang merupakan OPD yang mempunyai fungsi Koordinasi dan fasilitasi, pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIK AT
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Puluh Kota.	Nilai EKPPD 3,150	*		-
		Jumlah Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	10 Perda 20 Perbup 20 Pernag	10 Perda 20 Perbup 20 Pernag	100	Sangat tinggi
		Nilai komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	67	66,57	99,35	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menggunakan dana bergulir	20 UMKM dan koperasi	20 UMKM dan koperasi	100	Sangat tinggi
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	90%	94,81%	118%	Sangat tinggi
		Persentase Masjid/Mushalla/MDA/TPQ yang dibantu melalui dana hibah	7,70	6,59	85,54	Tinggi
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	93,75%	125%	Sangat tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang	100%	100%	100%	Sangat tinggi

		terpublikasikan				
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%	97%	108%	Sangat tinggi

Pada umumnya Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang terkait dengan capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terlaksana dengan capaian rata-rata diatas 90%, Secara rinci pada masing-masing Bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian PUM

Analisis kinerja pelayanan bagian Pemerintahan Umum berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
2. Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang telah dilaksanakan dengan baik.
3. Terbinanya hubungan baik antara antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui komunikasi yang efektif. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.

4. Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penamaan Rupa Bumi yang telah dilaksanakan dengan baik.
5. Terlaksananya evaluasi kinerja pemerintah daerah. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Evaluasi kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Terlaksananya peningkatan pembangunan daerah. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya peningkatan pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
7. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS yang telah dilaksanakan dengan baik.
8. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) bagi aparatur Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah pendidikan dan pelatihan PATEN. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan yang telah dilaksanakan dengan baik.
9. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya PATEN di Kecamatan sesuai Permendagri no 4 tahun 2010. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan

penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan dengan baik.

10. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada aparatur Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya pemilihan camat berprestasi tingkat kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi camat berprestasi yang telah dilaksanakan dengan baik.

2. Bagian Hukum

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum.

3. Bagian Organisasi

Pada bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan bagian Organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan terhadap IKU Kabupaten .

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang melaksanakan pelayanan yang lebih banyak berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga lebih banyak yang merasakan pelayanan dari Bagian Organisasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Adapun analisis kinerja pelayanan bagian Kerjasama berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kesepakatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya
2. Terlaksananya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi maupun daerah
3. Terlaksananya Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya
4. Mewujudkan kerjasama sister city dengan negara negara yang memiliki kesamaan karakteristik, namun belum terlaksana karena belum adanya anggaran yang tersedia hingga saat ini.
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam pendataan perantau minang yang hingga saat ini (tahun 2018) belum maksimal karena keterbatasan dana.
6. Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau yang hingga saat ini baru terbentuk 1 (satu) nagari pilot project binaan kerjasama rantau dengan 4 (empat) nagari binaan Berjasama Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Terlaksananya pertemuan jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten dengan Perantau Minang, dimana untuk Tahun sebelumnya hingga tahun berjalan saat ini (2018) baru dapat mengikuti pertemuan dengan perantau yang sedang mengadakan acara HUT organisasi Perantau.
8. Sedangkan untuk kegiatan Rakor dengan Perantau yang diadakan di 4 (empat) lokasi lainnya yaitu Manado, Aceh, Batam dan Jakarta tidak dapat kita ikuti karena keterbatasan Anggaran.
9. Terlaksanakannya fungsi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD baik melalui rapat-rapat, laporan, kunjungan apangan ataupun bentuk lainnya.

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur/di evaluasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila di disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Meskipun demikian, dengan mengacu kepada dasar pembentukannya yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa ini memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas ini maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan pengadaan barang/jasa
- Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Dengan memperhatikan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 (lanjutan dari program/kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan), dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa ini hampir mendekati apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebagaimana dituangkan dalam renstra, indikator sasaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah ***lancarnya pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan aturan perundang-undangan***. Sedangkan untuk mendukung pencapaian ini, maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender sebanyak 83 paket oleh pokja di Bagian PBJ. Disamping itu juga telah terlaksana proses pengadaan langsung atas permintaan OPD sebanyak 200 paket.
- Melaksanakan pembinaan SDM di Bagian PBJ melalui bimtek-bimtek dan proses inpassing SDM untuk menjadi jabatan fungsional PBJ.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Melaksanakan pendampingan pengadaan barang/jasa di OPD OPD karena Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menjadi tempat konsultasi bagi OPD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

6. Bagian Perekonomian

berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan

tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian

7. Bagian Kesra

Pada bagian Kesra, capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel di bawah ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	-	7,70 %	6,59 %	85,54%

Secara rinci Masjid yang dibantu berjumlah sebanyak 73 Masjid, dimana bantuan ini diserahkan bersamaan dengan momen safari ramadhan sebanyak 68 Masjid dan diluar kegiatan safari ramadhan sebanyak 5 Masjid. Sedangkan jumlah Mushalla yang dibantu sebanyak 15 Mushalla, 8 Mushalla pada saat safari ramadhan dan 7 mushalla diluar kegiatan safari ramadhan. Adapun jumlah anggaran yang terealisasi untuk bantuan hibah Masjid/ Mushalla mencapai Rp.1.158.000.000,-

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut

8. Bagian Umum

Bagian Umum dan Perlengkapan merupakan bagian dengan tugas menyelenggarakan pengadaan, administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, perjalanan dinas, keprotokolan, perlengkapan serta penyelenggaraan rumah tangga lingkup Sekretariat Daerah dan rumah tangga Bupati / Wakil Bupati

atau Sekretaris Daerah serta pelaksanaan sebagian urusan pemerintah, sub-sub bidang fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, Bagian Umum dan Perlengkapan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten;
- Pelaksanaan tata usaha pimpinan;
- Pelaksanaan urusan perjalanan dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan bagi kebutuhan gedung kantor, rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan tamu Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan keprotokoleran;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Dengan memperhatikan pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2017, dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Umum dan Perlengkapan ini hampir mendekati apa yang diharapkan pada awal perencanaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini terlihat pada :

- Terlaksananya administrasi umum dengan baik dan lancar;
- Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan penunjang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Terlaksananya urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah dengan baik dan lancar;
- Terlaksananya layanan keprotokolan terhadap kegiatan KDH / WKDH maupun tamu-tamu yang datang;

- Tersedianya mobilitas yang representatif untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Terselenggaranya berbagai even-even berskala Lokal maupun Nasional yang tidak terlepas dari peranan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam penyediaan sarana dan prasarana;
- Terselenggaranya berbagai kegiatan Bupati / Wakil Bupati dalam kunjungan kemasyarakatan;
- Tersedianya mobiler dan perlengkapan Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah baik di kantor maupun di rumah dinas.

9. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan merupakan bagian dengan tugas menyelenggarakan penatausahaan Keuangan didalam lingkup Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah ;
3. Pelaksanaan penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Daerah.

Dengan memperhatikan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020, dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Keuangan ini hampir mendekati apa yang diharapkan pada awal perencanaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini terlihat pada:

1. Terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar
2. Terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis.
3. Terwujudnya Laporan akhir Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

10. Bagian Humas dan Pemberitaan

Pelayanan Informasi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna informasi. Tim pelayanan informasi memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi sesuai dengan keyakinan profesi dan standar yang ditetapkan. Hal ini ditujukan agar pelayanan informasi

yang diberikan senantiasa merupakan pelayanan yang memiliki nilai *security* serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Bentuk kinerja yang dilaksanakan selama ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan kerja sama pemberitaan dan penyiaran dengan media cetak dan elektronik lokal tentang program maupun kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Melakukan pengiriman dan penerimaan informasi tentang kegiatan baik yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat maupun oleh Pemerintah Pusat.
- Meliput kegiatan kepala daerah ke lapangan dan membuat pers rilis nya untuk disebarluaskan kepada wartawan yang bertugas di Lima Puluh Kota.
- Melaksanakan pelayanan keprotokolan kepala daerah di setiap acara/kegiatan yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati
- Melakukan inventarisasi kegiatan PD melalui pertemuan Bakohumas serta Pertemuan PPID Lima Puluh Kota.

Adanya target yang tidak tercapai secara maksimal bukan berarti ini menandakan adanya gap atau kesenjangan yang begitu besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah kurang

antusiasnya PD dalam mengikuti kegiatan Pertemuan Bakohumas dan PPID dan anggaran yang kurang mendukung, minimnya tenaga peliputan di lapangan serta kurangnya peralatan dokumentasi berupa kamera video dan kamera foto digital sehingga tidak dapat mendokumentasikan semua kegiatan sekaligus pada waktu yang sama. Hal ini mempengaruhi jumlah liputan kegiatan dan press realise untuk mas media yang ditargetkan setiap hari.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu- isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, antara lain

1. Bagian PUM

Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi lembaga berupaya mewujudkan dan menjalankan visi dan misi daerah sebagai komitmen bersama. Upaya yang dilakukan merupakan tindakan preventif dan antisipatif sebagai langkah pengendalian terhadap berbagai permasalahan dibidang Pemerintahan secara Umum yang perlu dilakukan pembenahan dan pengaturan melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit. Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dari tahun sebelumnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan.

Selanjutnya selain dari Isu–Isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (RENJA), Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait pada bidang Pemerintahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) ditahun 2019 dan juga berdasarkan kondisi beberapa tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan globalisasi dan tuntutan peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum didukung dengan kompetensi dan cakrawala berfikir serta wawasan aparatur. Masih banyaknya aparatur yang tidak mampu mengembangkan bidang tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dikarenakan kurangnya penguasaan pengetahuan, pengalaman kerja dan keterampilan teknis;
2. Adanya tahapan–tahapan dalam rangkaian kegiatan yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan, seperti pengadaan tanah dalam pengembangan Ibu Kota Sarilamak dikarenakan ketentuan yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih berbentuk Ranperda;
3. Tuntutan peningkatan kinerja dan kualitas kerja aparatur Bagian TAPUM belum mampu diwujudkan secara optimal dikarenakan masih dirasakan minimnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang *representative* untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas;
4. Anggaran pelaksanaan kegiatan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan terjadi kendala–kendala dilapangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi berjalan lamban dan tidak memenuhi target;

5. Masih dirasakan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang cenderung mengedepankan ego sektoral dan mementingkan kepentingan instansi masing-masing;
6. Perubahan SOTK dan TUPOKSI pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menyebabkan adanya tugas pokok dan fungsi yang ditambahkan dan menjadi kewenangan pada Tata Pemerintahan Umum (TAPUM).

2. Bagian Hukum

Bagian Hukum memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi Bagian Hukum, antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum dikalangan generasi muda cenderung meningkat.

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk melaksanakan hal dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memulai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun

oleh MENPAN-RB yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan membuat rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berbagai tahapan selama lima tahun dengan sasaran yang jelas.

Untuk periode 2016 - 2021 Bagian Organisasi sedang menyusun kembali Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Road map reformasi Birokrasi tersebut. Adanya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

b. Analisa Jabatan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja PNS serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan PNS. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan pemerintah Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM pada 6 Bidang Pelayanan Dasar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, PUPR, Trantibum Linmas dan Sosial, sehingga semua peraturan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan.

Pemerintah menyusun dan menetapkan SPM untuk menjamin hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

SPM yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah diharapkan telah mampu untuk menerapkan SPM ini pada unit kerjanya masing-masing.

4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan. Selanjutnya selain dari Isu–Isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan, juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait pada bidang Kerjasama sebagai berikut :

1. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
2. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.

4. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau
5. Pembentukan jaringan komunikasi rantau yang didasarkan pada data perantau baik data dari nagari maupun dari perantau yang telah terorganisir.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan ditahun 2019 dan juga berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan Non Departemen yang telah dan sedang berjalan.
- b. Kurang tersosialisasinya pemahaman terhadap Kerjasama Daerah terhadap OPD yang ada yang mengakibatkan perbedaan persepsi tentang Kerjasama Daerah .
- c. Adanya perbedaan aturan yang mengatur tentang kerjasama dari beberapa kementerian dengan kerjasama yang bersifat teknis yang mengakibatkan lambatnya/belum dapat mewujudkan kerjasama yang akan dibangun.
- d. Tuntutan peningkatan kinerja dan kualitas kerja aparatur Bagian Kerjasama belum mampu diwujudkan secara optimal dikarenakan masih dirasakan minimnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang *representative* untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas;
- e. Anggaran pelaksanaan kegiatan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan terjadi kendala–kendala dilapangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi berjalan lamban dan tidak memenuhi target;
- f. Masih dirasakan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang cenderung mengedepankan ego sektoral dan mementingkan kepentingan instansi masing–masing;

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum tugas dan fungsi bagian pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada:

- Adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun PPHP yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
- Terlaksananya proses tender paket-paket pengadaan dari OPD di UKPBJ sesuai dengan perencanaan.
- Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa di OPD, baik melalui pemantauan lapangan maupun dari OPD yang datang untuk berkonsultasi.

Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

- Personil yang mengikuti pelatihan bukanlah personil yang terlibat secara aktif dalam pengadaan barang/jasa.
- Adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga jumlah bimtek dan personil bimtek yang dapat dilaksanakan terbatas jumlahnya.
- Kurangnya keinginan OPD untuk berkonsultasi ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas akan mengganggu pencapaian hal yang ditetapkan sehingga perlu disikapi secara cermat. Walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi, peluang bagi Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kinerja masih terbuka lebar. Hal ini disebabkan oleh karena instansi pemerintahan pastilah tidak bisa lepas dari pengadaan barang/jasa sedangkan semua bentuk pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan di arahkan untuk dilaksanakan secara elektronik.

6. Bagian Perekonomian

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, badan, dinas terkait belum terlaksana dengan baik dalam pemenuhan ketersediaan data ekonomi yang dapat dijadikan sumber referensi komoditi yang dihasilkan masyarakat maupun komoditi kekayaan alam.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengurus PKP-RI.
- c. Belum optimalnya penyediaan data, informasi dan laporan mengenai UMK dan koperasi dalam menyusun dan mengumpulkan kegiatan UMK dan koperasi mana yang aktif dan non aktif untuk memacu perkembangan usaha kelompok.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan perekonomian yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi.
- e. Penyelenggaraan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dipasaran masih belum terlaksana sesuai dengan target kinerja yang direncanakan karena keadaan alam yang berubah tak menentu yang menyebabkan dampak terhadap pertanian dan harga barang.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap pupuk/ pestisida bersubsidi dari produsen s/d kelompok tani.
- g. Masih ditemukannya peredaran produk rokok dipasaran tanpa dilekati pita cukai/illegal.
- h. Belum tercapai secara optimal mengenai penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- i. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Kinerja pelayanan Bagian Perekonomian pada tahun 2019 belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana :

1. *Klinik Pengaduan*

Perlu adanya klinik pengaduan di Bagian Perekonomian masih harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar memperoleh hasil capaian seperti yang ditargetkan seperti yang dituangkan dalam agenda kegiatan. sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan kualitas penyelesaian masalah perekonomian.

2. Pelaksanaan Rapat Bagian Perekonomian. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian terhadap stakeholder yang ada.
3. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui Whatsapp group.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum adanya klinik pengaduan dalam rangka menampung permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian.
2. Belum meratanya kualitas SDM yang ada pada Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi terkait.
3. Masih rendahnya koordinasi yang dilakukan dalam pengumpulan data yang valid dan akurat sesuai kebutuhan organisasi.
4. Hambatan lokasi yang jauh jaraknya dan lemahnya jaringan internet sehingga menyebabkan keterlambatan informasi yang diperlukan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Kurangnya data yang akurat dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai harga komoditi yang beredar.
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap pupuk/ pestisida bersubsidi dari produsen s/d kelompok tani.
Masih ditemukannya
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengurus PKP-RI.
4. Belum optimalnya penyediaan data, informasi dan laporan mengenai UKM dan koperasi dalam menyusun dan mengumpulkan kegiatan UMK dan koperasi mana yang aktif dan non aktif untuk memacu perkembangan usaha kelompok.
5. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan perekonomian yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi.
6. Penyelenggaraan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dipasaran masih belum terlaksana sesuai dengan target kinerja yang direncanakan karena keadaan alam yang berubah tak menentu yang menyebabkan dampak terhadap pertanian dan harga barang.
7. Belum optimalnya pengawasan peredaran produk rokok dipasaran tanpa dilekati pita cukai/illegal.
8. Belum tercapai secara optimal mengenai penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melihat pada permasalahan di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Perekonomian dimasa mendatang, tantangan yang Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah tahun 2016-2021. Bagian Perekonomian merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.

Tantangan yang dihadapi Bagian Perekonomian dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Koordinasi dengan UKM dan Koperasi perlu adanya wadah untuk menampung aspirasi/langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat kecil
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
- Meningkatkan tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Bagian Perekonomian dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

Bagian Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagian yang melakukan koordinasi dengan instansi/dinas teknis yang berhubungan dengan laju perekonomian yang ada. Untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan informasi dalam rangka pembangunan dalam bidang perekonomian sesuai dengan perundangan yang berlaku, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu

– isu strategis yang tengah dihadapi oleh Bagian Perekonomian saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- Kuantitas dan Kapasitas SDM Bagian Perekonomian yang masih perlu ditingkatkan;
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- Masih belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat OPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
- Belum terakomodirnya secara maksimal usulan-usulan yang bersifat bottom up.

7. Bagian Kesra

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesra dirumuskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Visi Kab. Lima Puluh Kota yang “Islami” maka seharusnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mencerminkan nuansa islami, dengan demikian diharapkan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2. Sejalan dengan IKU untuk meningkatkan aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ dengan indikatornya yaitu persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan anggaran hibah untuk Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ pada tahun 2021 agar IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3. Kegiatan Baliak Basurau untuk lebih dipotimalkan dengan melibatkan seluruh stakeholders.
4. Perlu dilakukan standarisasi kurikulum untuk TPQ, MDTA dan Surau dalam bentuk silabus yang dikeluarkan oleh Kabupaten, sehingga program dan kegiatan Baliak Basurau dapat berjalan Optimal.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh lembaga-lembaga keagamaan di Kab. Lima Puluh Kota, agar pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
6. Berhubung saat ini anggaran Nagari yang relatif besar, maka diharapkan pada seluruh nagari di Kab. Lima Puluh Kota dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan MUNA (Majelis Ulama Nagari).
7. Sudah selayaknya Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota mempunyai **Islamic Centre** sebagai salah satu wadah untuk lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah.

8. Bagian Umum

Mengutamakan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik secara institusional oleh masing-masing pejabat struktural pada Bagian Umum dan Perlengkapan maupun secara personal oleh staf birokrasinya. Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan pelayanan KHD / WKDH merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Oleh karena itu Bagian Umum dan Perlengkapan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan.

9. Bagian Keuangan

Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Oleh karena itu Bagian Keuangan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Keuangan seperti terselenggaranya administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Bagian Humas

Kinerja pelayanan Bagian Humas dan Protokoler pada tahun 2020 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelaksanaan Peliputan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pelaksanaan keprotokoleran kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kada maupun kegiatan-kegiatan di OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Melayani kerjasama dengan media cetak dan elektronik.
4. Pelaksanaan kegiatan pertemuan Bakohumas sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap stakeholders. Diharapkan setiap humas yang ada di OPD aktif memberikan informasi kegiatan OPD kepada Humas.
5. Aplikasi *e-kliping* untuk memudahkan penyimpanan kliping koran.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum memadainya peralatan dan perlengkapan peliputan yang ada pada Bagian Humas.
2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap pentingnya kegiatan Bakohumas yang dilaksanakan oleh Bagian Humas.
3. Banyaknya media cetak maupun online yang baru dan menuntut untuk bekerjasama dengan Bagian Humas.
4. Keterbatasan anggaran dimana permintaan publikasi oleh pimpinan melalui media cetak/elektronik tidak diimbangi dengan ketersediaan dana yang memadai.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Sekretariat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Sekretariat Daerah ini juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, rumusan- rumusan serta besaran- besaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD tidak terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		terlaksananya administrasi perkantoran	100%	7,556,792,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		terlaksananya administrasi perkantoran	100%	7,556,792,000	Rutin OPD
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Setda	Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	12 Bulan	20,000,000	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Setda	Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	12 Bulan	20,000,000	Rutin OPD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda	Terpenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon sesuai dengan kebutuhan	11 Bulan	800,000,000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda	Terpenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon sesuai dengan kebutuhan	11 Bulan	800,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Setda	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor	100%	300,000,000	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Setda	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor	100%	300,000,000	Rutin OPD
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Setda	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	79,942,000	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Setda	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	79,942,000	Rutin OPD
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Setda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	90,000,000	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Setda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	90,000,000	Rutin OPD
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda	Terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	7 Bulan	90,000,000	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda	Terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	7 Bulan	90,000,000	Rutin OPD
7	Penyediaan makanan dan minuman	Setda	Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat	12 bulan	1,400,000,000	7	Penyediaan makanan dan minuman	Setda	Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat	12 bulan	1,400,000,000	Rutin OPD
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda	Tersedianya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	100%	3,265,000,000	8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda	Tersedianya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	100%	3,265,000,000	Rutin OPD
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Setda	Tersedianya jasa tenaga pendukung ADM/ teknis perkantoran setda	12 bulan	480,000,000	9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Setda	Tersedianya jasa tenaga pendukung ADM/ teknis perkantoran setda	12 bulan	480,000,000	Rutin OPD
10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Setda	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar	12 bulan	1,031,850,000	10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Setda	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar	12 bulan	1,031,850,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Setda	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur		4,922,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Setda	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur		4,922,000,000	Rutin OPD	
11	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Setda	Tersedianya Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	70%	600,000,000	11	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Setda	Tersedianya Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	70%	600,000,000	Rutin OPD
12	Pengadaan peralatan gedung	Setda	Tersedianya sarana untuk kebutuhan kelancaran pekerjaan kantor	85%	600,000,000	12	Pengadaan peralatan gedung	Setda	Tersedianya sarana untuk kebutuhan kelancaran pekerjaan kantor	85%	600,000,000	Rutin OPD
13	Pengadaan mebeleur	Setda	Tersedianya mebeleur kantor	100%	250,000,000	13	Pengadaan mebeleur	Setda	Tersedianya mebeleur kantor	100%	250,000,000	Rutin OPD
14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Setda	Terlaksanya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas	60%	450,000,000	14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Setda	Terlaksanya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas	60%	450,000,000	Rutin OPD
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Setda	Terlaksanya pemeliharaan gedung kantor	50%	402,000,000	15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Setda	Terlaksanya pemeliharaan gedung kantor	50%	402,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
16	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Setda	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	6 Bulan	770,000,000	16	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Setda	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	6 Bulan	770,000,000	Rutin OPD
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Setda	Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	6 Bulan	1,100,000,000	17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Setda	Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	6 Bulan	1,100,000,000	Rutin OPD
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	250,000,000	18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	250,000,000	Rutin OPD
19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Setda	Terlaksanya rahabilitasi sedang/berat rumah jabatan	100%	500,000,000	19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Setda	Terlaksanya rahabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehab sedang berat rumah dinas di komplek rumah dinas pemda di payakumbuh	500,000,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur		550,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur		550,000,000	Rutin OPD	
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Setda	Terlaksanya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya	124 stel	550,000,000	20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Setda	Terlaksanya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya	124 stel	550,000,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		324,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		324,000,000	Rutin OPD	
21	Pendidikan dan pelatihan formal	Setda	Terlaksananya Pendidikan Formal Bagi PNS daerah	80%	100,000,000	21	Pendidikan dan pelatihan formal	Setda	Terlaksananya Pendidikan Formal Bagi PNS daerah	80%	100,000,000	Rutin OPD
22	Bimtek Teknis Keprotokoleraan	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokoleraan yang berlaku	90%	84,000,000	22	Bimtek Teknis Keprotokoleraan	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokoleraan yang berlaku	90%	84,000,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Setda	Terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah yang akuntabel		198,150,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Setda	Terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah yang akuntabel		198,150,000	Rutin OPD	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setda	meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai BB pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	130,000,000	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setda	meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai BB pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	175,688,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Setda	Terwujudnya laporan keuangan semesteran sekretariat daerah	1 dokumen	33,136,000	24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Setda	Terwujudnya laporan keuangan semesteran sekretariat daerah	1 dokumen	33,136,000	Rutin OPD
25	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	35,014,000	25	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	35,014,000	Rutin OPD
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	1,524,120,000	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	1,524,120,000	Rutin OPD	
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Setda	Terlaksananya dialog/audiensi Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	400 orang	40,000,000	1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Setda	Terlaksananya dialog/audiensi Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	400 orang	40,000,000	Rutin OPD
2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen	Setda	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara /Pemerintahan non Departemen/ Luar Negeri	12 bulan	450,000,000	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen	Setda	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara /Pemerintahan non Departemen/ Luar Negeri	12 bulan	450,000,000	Rutin OPD
3	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Setda	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dan rapat-rapat koordinasi camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota dengan lancar	12 kali	50,000,000	3	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Setda	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dan rapat-rapat koordinasi camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota dengan lancar	12 kali	50,000,000	Rutin OPD
4	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	12 Bulan	200,000,000	4	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	12 Bulan	200,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
5	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Setda	(1). Terikutinya rapat koordinasi Kepala Daerah, rakor Tata Pemerintahan, koordinasi dengan pusat dan tersedianya bahan rapat koordinasi. (2). Terikutinya program dan kegiatan APKASI	(1). 6 kali, 6 kali, 4 kali, dan 28 doku men. (2). 1 kali	199,914,000	5	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Setda	(1). Terikutinya rapat koordinasi Kepala Daerah, rakor Tata Pemerintahan, koordinasi dengan pusat dan tersedianya bahan rapat koordinasi. (2). Terikutinya program dan kegiatan APKASI	(1). 6 kali, 6 kali, 4 kali, dan 28 dokumen. (2). 1 kali	199,914,000	Rutin OPD
6	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / KDH/WKDH (Lemhanas)	Setda	Terlaksananya Lemhanas Pimpinan daerah	6 orang	384,206,000	6	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / KDH/WKDH (Lemhanas)	Setda	Terlaksananya Lemhanas Pimpinan daerah	6 orang	384,206,000	Rutin OPD
7	Layanan Keprotokolan Kunjungan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	90%	224,000,000	7	Layanan Keprotokolan Kunjungan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	90%	224,000,000	Rutin OPD
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda		100%	426,505,000	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda		100%	426,505,000	IKU Kepala OPD	
8	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Setda	ditetapkannya tapal batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang jelas	(1) 6kali, 2kali kepusat (2) 6kali (3) 13 Kecamatan (4) 4kali ke Pemerintah Provinsi dan 4kali ke Pemerintah Pusat.	24,196,500	8	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Setda	ditetapkannya tapal batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang jelas	(1) 6kali, 2kali kepusat (2) 6kali (3) 13 Kecamatan (4) 4kali ke Pemerintah Provinsi dan 4kali ke Pemerintah Pusat.	24,196,500	IKU Kepala OPD
9	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Setda			44,498,000	9	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Setda			44,498,000	IKU Kepala OPD
10	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terlaksananya SOP UKPBJ yang sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Terlaksananya pembinaan PBJ pada OPD lain di Nagari, Terlaksananya konsultasi dengan LKPP tentang Format Standar sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBJ.	2 format	341,026,200	10	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terlaksananya SOP UKPBJ yang sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Terlaksananya pembinaan PBJ pada OPD lain di Nagari, Terlaksananya konsultasi dengan LKPP tentang Format Standar sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBJ.	2 format	341,026,200	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda	Terlaksananya proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada UKPBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE, Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil	90%	910,031,075	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda	Terlaksananya proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada UKPBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE, Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil	90%	910,031,075	IKU Kepala OPD
12	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Terlaksananya koordinasi permasalahan perundang undangan	100 %	250,000,000	12 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Terlaksananya koordinasi permasalahan perundang undangan	100%	250,000,000	IKU Kepala OPD
13	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	134,727,750	13 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	134,727,750	IKU Kepala OPD
14	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	25 Kali Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	109,029,200	14 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	25 Kali Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	109,029,200	IKU Kepala OPD
15	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	94,325,100	15 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	94,325,100	IKU Kepala OPD
16	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	80 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	164,847,125	16 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	80 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	164,847,125	IKU Kepala OPD
17	Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Setda	Jumlah Rancangan Perda yang dikaji	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	87,686,600	17 Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Setda	Jumlah Rancangan Perda yang dikaji	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	87,686,600	IKU Kepala OPD
18	Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)	Setda	Jumlah peraturan nagari yang dievaluasi	125 peraturan nagari yang dievaluasi	69,415,300	18 Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)	Setda	Jumlah peraturan nagari yang dievaluasi	125 peraturan nagari yang dievaluasi	69,415,300	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	Program Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	1 Peraturan Perundang-Undangan	310,000,000	Program Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	1 Peraturan Perundang-Undangan	420,430,000	IKU Kepala OPD
20	Penetapan Standar Pelayanan Publik	Setda	OPD yang telah menyusun standar pelayanan dan SOP	100%	40,000,000	20 Penetapan Standar Pelayanan Publik	Setda	OPD yang telah menyusun standar pelayanan dan SOP	100%	111,212,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
21	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Setda	Tersosialisasikan nya road map reformasi birokrasi	Seluruh OPD	80,000,000	21 Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Setda	Tersosialisasikan nya road map reformasi birokrasi	Seluruh OPD	101,660,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Setda	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	40,000,000	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Setda	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	61,240,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
22	Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Setda	Tersusunnya Ranperda perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran perubahan OPD	1 Perbup	150,000,000	22 Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Setda	Tersusunnya Ranperda perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran perubahan OPD	1 Perbup	146,318,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda	Ranperda(perda) perubahan opd dan Ranperbup(Perbup) penjabaran perubahan opd	1 perda dan 9 perbup	935,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda	Ranperda(perda) perubahan opd dan Ranperbup(Perbup) penjabaran perubahan opd	1 perda dan 9 perbup	935,000,000	IKU Kepala OPD
23	Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Setda	Terbinanya hubungan baik antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Permerintahan melalui komunikasi yang efektif	100%	160,000,000	23 Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Setda	Terbinanya hubungan baik antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Permerintahan melalui komunikasi yang efektif	100%	160,000,000	IKU Kepala OPD
24	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan sektor ekonomi	4 buah MoU/Moa	155,000,000	24 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan sektor ekonomi	4 buah MoU/Moa	155,000,000	IKU Kepala OPD
25	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembara	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, provinsi maupun daerah	100%	200,000,000	25 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembara	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, provinsi maupun daerah	100%	200,000,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
26	Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Setda	Tercapainya kesepakatan atas dasar kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah baik pemerintah badan maupun pihak ketiga	4 buah MoU/ MoA	70,000,000	26	Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Setda	Tercapainya kesepakatan atas dasar kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah baik pemerintah badan maupun pihak ketiga	4 buah MoU/MoA	70,000,000	IKU Kepala OPD
27	Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Setda	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam perdataan perantau	100%	150,000,000	27	Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Setda	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam perdataan perantau	100%	150,000,000	IKU Kepala OPD
28	Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Setda	Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau	100%	200,000,000	28	Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Setda	Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau	100%	200,000,000	IKU Kepala OPD
	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Masyarakat	Setda	Meningkatnya Pemahaman keagamaan masyarakat	100 %	1,412,945,000	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Masyarakat	Setda	Meningkatnya Pemahaman keagamaan masyarakat	100%	1,412,945,000	IKU Kepala OPD	
28	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Setda	Terikutinya even MTQ Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat	1 even	964,650,000	28.	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Setda	Terikutinya even MTQ Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat	1 even	964,650,000	IKU Kepala OPD
29	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Setda	Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam di Kab. Lima Puluh Kota	5 kali	90,000,000	29.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Setda	Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam di Kab. Lima Puluh Kota	5 kali	90,000,000	IKU Kepala OPD
30	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompoetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh (LDS)	Setda	Terlaksananya pembinaan didikan subuh	13 LDS	83,175,000	30.	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompoetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh (LDS)	Setda	Terlaksananya pembinaan didikan subuh	13 LDS	83,175,000	IKU Kepala OPD
31	Safari Ramadhan	Setda	Terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke Masjid di seluruh kecamatan	79 masjid	225,120,000	31.	Safari Ramadhan	Setda	Terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke Masjid di seluruh kecamatan	79 masjid	225,120,000	IKU Kepala OPD
34	peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Setda	Terlaksananya wirid pengajian dan senam pagi	21 kali wirid dan 21 kali senam	50,000,000	34.	peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Setda	Terlaksananya wirid pengajian dan senam pagi	21 kali wirid dan 21 kali senam	50,000,000	IKU Kepala OPD
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda		100%	669,348,750	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda		100%	669,348,750	IKU Kepala OPD	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
1	Penamaan Rupa Bumi	Setda	(1). 6 kecamatan, 38 nagari dan 1 dokumen. (2). Penyampaian data rupabumi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.	100%	96,932,000	1	Penamaan Rupa Bumi	Setda	(1). 6 kecamatan, 38 nagari dan 1 dokumen. (2). Penyampaian data rupabumi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.	100%	96,932,000	IKU Kepala OPD
2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Setda	Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100%	19,656,250	2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Setda	Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100%	19,656,250	IKU Kepala OPD
3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setda	(1). Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2018).	(1). Buku LKPJ dan Nota LKPJ tahun 2018	276,777,000	3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setda	(1). Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2018).	(1). Buku LKPJ dan Nota LKPJ tahun 2018	276,777,000	IKU Kepala OPD
4	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Setda	Tersedianya peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	1 perbup	58,094,500	4	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Setda	Tersedianya peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	1 perbup	58,094,500	IKU Kepala OPD
5	Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa	Setda	Tersedianya format-format yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa	2 format	230.828.000	5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Laporan triwulan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan	50,838,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
6	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97%	501.492.000	6	Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terfasilitasinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa	10 masalah	32,063,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa	Setda	Laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa	4 laporan	67.582.000	7	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Setda	Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9 Laporan	80,472,000	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Setda			2,757,055,000	Program Pengembangan Nilai Budaya	Setda				2,757,055,000	IKU Kepala OPD
1	Peningkatan Nilai- nilai budaya dan keagamaan	Setda	Terlaksananya kegiatan Baliak Basurau	79 Nagari	2,384,095,000	1	Peningkatan Nilai- nilai budaya dan keagamaan	Setda	Terlaksananya kegiatan Baliak Basurau	79 Nagari	2,384,095,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu			
	2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Setda	Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kab. Lima Puluh Kota	1 kali pemberangkatan dan 1 kali pemulangan	372,960,000	2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Setda	Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kab. Lima Puluh Kota	1 kali pemberangkatan dan 1 kali pemulangan	372,960,000	IKU Kepala OPD
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Setda			137,045,000	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Setda			137,045,000	IKU Kepala OPD
	1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Setda	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	100%	61,629,000	1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Setda	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	100%	61,629,000	IKU Kepala OPD
	2	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Setda	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	2 Bimtek/ diklat	98.573.000	2	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Setda	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	2 Bimtek/ diklat	185.573.000	IKU Kepala OPD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Setda			295,147,400	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Setda			295,147,400	IKU Kepala OPD
	3	Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi	Setda	Terlaksananya penilaian camat berprestasi tingkat Kab. Lima Puluh Kota	1 kali penyelenggaraan,	49,703,000	3	Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi	Setda	Terlaksananya penilaian camat berprestasi tingkat Kab. Lima Puluh Kota	1 kali penyelenggaraan,	49,703,000	IKU Kepala OPD
	4	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Setda	Dokumen Analisis Jabatan	6 SKPD	150,000,000	4	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Setda	Tersedianya acuan untuk pengisian jabatan dan pengembangan SDM Aparatur	6 SKPD	153,252,000	IKU Kepala OPD
	5	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Setda	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun evaluasi jabatan	100%	70,000,000	5	Penyusunan Analisis Jabatan	Setda	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun evaluasi jabatan	100%	130,000,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Setda			128,975,400	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Setda			128,975,400	IKU Kepala OPD
	6	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Setda			65,267,450	6	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Setda			65,267,450	IKU Kepala OPD
	7	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Setda	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	40 aparat ur kecamatan	60,667,950	7	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Setda	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	40 aparat ur kecamatan	60,667,950	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Setda	Persentase koordinasi pelaksanaan event pameran yang menunjang perekonomian daerah	95%	346,448,000	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Setda	Persentase koordinasi pelaksanaan event pameran yang menunjang perekonomian daerah	95%	346,448,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Setda	Jumlah event pameran yang diikuti pemkab dan koordinasi dengan SKPD terkait	6 event	316,930,000	1 Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Setda	Jumlah event pameran yang diikuti pemkab dan koordinasi dengan SKPD terkait	6 event	316,930,000	IKU Kepala OPD
	2 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Setda	Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi anggota dan pengurus KP-RI	30 PKP RI	29,518,000	2 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Setda	Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi anggota dan pengurus KP-RI	30 PKP RI	29,518,000	IKU Kepala OPD
		Setda	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan bagi pengurus/anggota PKP-RI	1 kali sosialisasi			Setda	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan bagi pengurus/anggota PKP-RI	1 kali sosialisasi		
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Setda	Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir sesuai aturan	85%	95,250,000	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Setda	Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir sesuai aturan	85%	95,250,000	IKU Kepala OPD
	3 Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkuatan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM	2 Laporan	95,250,000	3 Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkuatan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM	2 Laporan	95,250,000	IKU Kepala OPD
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Setda	Persentase evaluasi dan pelaporan	85%	32,680,000	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Setda			32,680,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Setda	Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA	2 Laporan	32,680,000	1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Setda	Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA	2 Laporan	32,680,000	IKU Kepala OPD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	Setda	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	90%	44,685,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	Setda	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	90%	44,685,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	1 kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Setda	Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	2 Laporan	44,685,000	1 kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Setda	Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	2 Laporan	44,685,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Setda	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	90%	474,272,000	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Setda	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	90%	474,272,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Setda	(1) jumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBHCHT	2 Laporan	374,272,000	1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Setda	jumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBHCHT	2 Laporan	374,272,000	IKU Kepala OPD
			(2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi, kepada masyarakat, instansi terkait mengenai ketentuan dibidang cukai dan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai/ilegal	1 kali Sosialisasi				(2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi, kepada masyarakat, instansi terkait mengenai ketentuan dibidang cukai dan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai/ilegal	1 kali Sosialisasi		
			(3) jumlah pelaksanaan talkshow radio dalam rangka pemberitahuan kepada masyarakat ttg aturan cukai tembakau	1 kali Talkshow				(3) jumlah pelaksanaan talkshow radio dalam rangka pemberitahuan kepada masyarakat ttg aturan cukai tembakau	1 kali Talkshow		
			(4) jumlah laporan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan	100,000,000			(4) jumlah laporan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan	100,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Setda	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan	90%	110,936,000	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Setda	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan		160,796,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	2 Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Setda	Jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	Setda	166,404,000	2 Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Setda	Jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	Setda	110,936,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Setda	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	90%	37,500,000	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Setda	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	90%	37,500,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Setda	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	70 buku	37,500,000	1 Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Setda	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	70 buku	37,500,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Setda	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan	90%	97,500,000	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Setda	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan	90%	97,500,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA	Setda	Jumlah koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta	6 BPR 1 Perusahaan Daerah	97,500,000	1 Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA	Setda	Tertelaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan perusahaan swasta	6 BPR 1 Perusahaan Daerah	97,500,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Setda	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	90%	42,382,000	Program pengembangan kemitraan	Setda	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	90%	42,382,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	42,382,000	1 Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	42,382,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase peningkatan jaringan komunikasi dan informasi antar OPD di Lingkungan Pemkab. Lima Puluh Kota	100%	147,094,200	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase peningkatan jaringan komunikasi dan informasi antar OPD di Lingkungan Pemkab. Lima Puluh Kota	100%	137,094,200	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Setda	Jumlah pelaksanaan kegiatan pertemuan Bakohumas Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	147,094,200	1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Setda	Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas	100%	137,094,200	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase tersebarluasnya kebijakan dan informasi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,622,305,850	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase tersebarluasnya kebijakan dan informasi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,500,305,850	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Setda	Terpantainya pemberitaan daerah di media cetak yang beredar di Lima Puluh Kota	100%	793,315,600	2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Setda	Tersedianya media cetak harian dan mingguan,	100%	731,315,600	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	3 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Setda	Tersebarinya informasi pembangunan daerah dan kebijakan daerah melalui media cetak/online serta terdokumentasikan ke Kepala daerah	100%	512,985,000	3 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Setda	Terbitnya Tabloid Sinamar	100%	472,985,000	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	4 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Setda	Tersebarinya informasi pembangunan daerah dan kebijakan daerah melalui media cetak/online serta terdokumentasikan ke Kepala daerah	100%	316,005,250	4 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Setda	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui spanduk/baliho penyampaian informasi	100%	296,005,250	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Setda	Meningkatnya pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan		130,000,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Setda	Meningkatnya pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan		130,000,000	IKU Kepala OPD
	1 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Setda	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kesra	12 bulan	50,000,000	1 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Setda	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kesra	12 bulan	50,000,000	IKU Kepala OPD
	2 Pelaksanaan pembinaan dan Lomba Lomba UKS	Setda	Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba UKS di Kab. Lima Puluh Kota	56 sekolah	80,000,000	2 Pelaksanaan pembinaan dan Lomba Lomba UKS	Setda	Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba UKS di Kab. Lima Puluh Kota	56 sekolah	80,000,000	IKU Kepala OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Propinsi, LSM, Asosiasi- asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel T-C.32

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	NIHIL				

Pada umumnya dalam menyusun Renja, Sekretariat Daerah tidak dapat menampung program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, karena program dan kegiatan teknis telah diserahkan kepada OPD terkait sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah bersifat Administrasi, Fasilitasi dan Koordinasi.

Namun beberapa usulan masyarakat yang dapat ditampung pada bagian Kesra. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan Baliak Basurau yang rutin dilaksanakan yang dampaknya cukup bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Pesan yang diambil dari masyarakat adalah agar kegiatan tersebut pada kegiatan Bagian Kesra dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah. Maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang mendukung misi tersebut, diantaranya :

1. Program Reformasi Birokrasi, dengan Kegiatan- kegiatan : Penyusunan Road Map Reformasi birokrasi. Program ini memfasilitasi program nasional dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan keselarasan dokumen road map reformasi birokrasi dengan RPJMD. Kegiatan Restrukturisasi/ penataan Tugas dan Fungsi OPD serta Penyusunan Aplikasi *e-kelembagaan* Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya peningkatan kualitas IKM dan Indeks Reformasi Birokrasi, serta Pelaksanaan PATEN untuk pelayanan Publik di tingkat
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan Program Penataan Otonomi Daerah, dengan Kegiatan- kegiatan diantaranya : Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi. Kegiatan- kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu : Peningkatan nilai EKPPD Kab. Lima Puluh Kota di tingkat Nasional, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga
3. Beberapa Program dibidang peningkatan kerjasama daerah, Peningkatan Promosi Daerah di event- event tingkat Propinsi dan Nasional, Program Pengembangan kemitraan di bidang Pariwisata, dan lain- lain.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat

dan *stakeholder* maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program- program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan dari renja Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam rencana strategis Sekretariat daerah, sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN dan disesuaikan dengan visi dan misi dari KDH terpilih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Secara Umum tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah nagari yang bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah secara internal dan eksternal
4. Meningkatkan kualitas pengendalian program dengan memanfaatkan sistem informasi
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Secara khusus tujuan dan sasaran Renja ini dapat dilihat tujuan dan sasaran dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Bagian PUM

A. Tujuan

Rencana Kerja Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) bertujuan agar terselenggaranya penyusunan kebijakan dan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, serta pengkoordinasian lembaga dan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang kuat dan dinamis selaku pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Peningkatan harmonisasi hubungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan.
4. Peningkatan pemahaman kapasitas aparatur kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Pada aparatur Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Bagian Hukum

Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang merupakan Rencana strategis yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengarahkan Sumber Daya Daerah Khususnya Bagian Hukum pada Tugas dan fungsinya. Adapun tujuan Pembuatan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sesuai dengan yang direncanakan dan tidak keluar dari fungsi Bagian Hukum.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basic data yang terkini dan akurat.

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi merupakan bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang bertugas untuk pengkoordinasian di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, tatalaksana dan pengembangan kinerja. Maka tujuan Rencana Kerja Bagian Organisasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penguatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
2. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya kompetensi aparatur
4. Terwujudnya ketatalaksanaan yang baik dan teratur

Sasaran Renja Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan LKiJP dan PK Pemda Kab. Lima Puluh Kota yang terukur dan tepat waktu
2. Meningkatnya penyusunan OPD, Tugas Pokok dan Fungsi yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kualitas penyusunan Tugas pokok dan fungsi pejabat struktural SKPD
4. Meningkatnya koordinasi penerapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Meningkatnya kualitas penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
6. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan pada lingkup Ppemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Bagian Kerjasama

Rencana Kerja Bagian Kerjasama disusun dengan tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Pembentukan Jaringan Komunikasi dan Rantau dengan Optimal sesuai dengan ketentuan pada peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Kerjasama Antar Daerah ;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kerjasama baik antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga maupun antara daerah dengan rantau melalui pembentukan jaringan komunikasi dan rantau ;
3. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi Ranah dan Rantau.

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan dan sasaran renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dari renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam rencana strategis bagian pengadaan barang/jasa. Sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN

6. Bagian Perekonomian

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD

atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Perekonomian pada tahun 2016-2021 memiliki 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Tujuan pertama adalah Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perekonomian daerah

1. Sasaran pertama adalah Meningkatnya barang pokok yang dipantau harganya dalam tahun-n
 - Persentase pemantauan dalam pengendalian inflasi daerah
2. Sasaran Kedua adalah Meningkatnya jumlah UMK dan koperasi di kab.LPK
 - Persentase UKM dan Koperasi yang aktif
3. Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya pengawasan dalam pengendalian pupuk dan pestisida bersubsidi
 - Persentase pupuk dan pestisida yang beredar

Tabel
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perekonomian daerah	Meningkatnya barang pokok yang dipantau harganya dalam tahun-n	Persentase pemantauan dalam pengendalian inflasi daerah	80%
		Meningkatnya jumlah UMK dan koperasi di kab.LPK	Persentase UKM dan Koperasi yang aktif	80%
		Meningkatnya pengawasan dalam pengendalian pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase pupuk dan pestisida yang beredar	80%

7. Bagian Kesra

Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang merupakan Rencana strategis yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengarahkan Sumber Daya Daerah Khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tugas dan fungsinya. Adapun tujuan Pembuatan Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sesuai dengan yang direncanakan dan tidak keluar dari fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.

8. Bagian Umum

Berdasarkan tugas dan fungsinya Bagian Umum dan Perlengkapan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa indikator kinerja dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Renja 2022

No	Indikator kinerja	Target
1.	Persentase sarana dan prasarana KDH/ WKDH dalam kondisi baik	95 %
2.	Persentase ASN yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya	95 %
3.	Persentase kegiatan KDH / WKDH yang terfasilitasi oleh protokoler	95 %

Sasaran dari rencana kerja yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana KDH / WKDH dalam keadaan baik
2. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian ASN Sekretariat Daerah secara baik
3. Meningkatnya kegiatan KDH / WKDH yang dapat difasilitasi oleh protokoler.

9. Bagian Keuangan

Berdasarkan misi pembangunan tersebut, walaupun secara umum Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terlibat dalam

keseluruhan misi akan tetapi lebih spesifiknya keterlibatan Bagian Keuangan adalah pada misi Peningkatan penatausahaan keuangan mendukung tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam pemerintahan

10. Bagian Humas

Tujuan strategis Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut : “Mewujudkan dan memantapkan sistem administrasi kebijakan publik melalui kelembagaan Humas dan Protokol yang berkualitas serta penyelenggaraan keprotokoleran kada / wakil kada didukung dengan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kerja sama dengan media cetak dan elektronik, dokumentasi serta sandi dan telekomunikasi”.

Guna mencapai tujuan tersebut ditetapkan pula sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatkan kualitas aparatur pegawai serta kerjasama hubungan kemitraan yang harmonis antara perangkat daerah, pers dan masyarakat dalam mensukseskan berbagai kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2022 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati terpilih, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019

Tabel. 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Administrasi Tata Pemerintahan	1 Penataan Administrasi Pemerintahan
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		5 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		6 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		8 Fasilitasi Bantuan Hukum
		9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	10 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		11 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		12 Evaluasi Kerjasama
II. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	6. Administrasi Pembangunan	16 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		17 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		18 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	7. Pengadaan Barang dan Jasa	19 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		20 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		21 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	8. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	22 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
		23 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		24 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		26. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		27. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		28. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		29. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		31 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		32 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	11. Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		34 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		35 Fasilitasi Kunjungan Tamu
		37 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		39. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		40. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		42. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		43. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		44. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<p>46. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>47. Pemeliharaan Mebel</p> <p>48. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>49. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>50. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
	<p>15. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>52. Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/ wakil KDH</p> <p>53. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>54. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>55. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>
	<p>16. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p>	<p>56. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>57. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</p>

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		58. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	17. Penataan Organisasi	59. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		60. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		61. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		62. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		62. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	18. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	64. Fasilitasi Keprotokolan
		65. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		66. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran yang berbasis kinerja. Sekretariat Daerah yang merupakan OPD dengan tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif terhadap OPD dan seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian Sekretariat Daerah mempunyai rencana kerja dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Daerah telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seluruh pendanaan kegiatan masing- masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 pada dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Sekretariat Daerah ini.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4																	
4	01						43,505,661,014							47,311,518,476			
4	01	01					26,736,544,614							29,819,008,244			
4	01	01	2.02				14,875,824,500							16,760,142,772			
4	01	01	2.02	01			13,788,746,500	12 Bulan 12 Bulan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan 12 Bulan	15,592,471,172	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.02	03			708,069,000	80 Dokumen 12 Bulan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			80 Dokumen 12 Bulan	758,662,600	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.02	05			112,001,200	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	112,001,200	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.02	07			220,075,000	12 Bulan 12 Bulan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		12 Bulan 12 Bulan	250,075,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.02	08			46,932,800	12 Bulan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	46,932,800	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.05				649,618,300							1,398,669,000			
4	01	01	2.05	02			260,060,000	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90 %	260,060,000	SEKRETARIAT DAERAH		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terikutinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur				15 orang	48,728,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		15 orang	708,609,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Aparatur	237,559,300	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400 Aparatur	280,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan				60 Aparatur	103,271,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Aparatur	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,239,366,000							3,239,366,000	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan				12 bulan	76,589,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	76,589,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makan minum Kepala Daerah dan Kepala Dearah, Tamu, dan Rapat-Rapat, terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri, dan terfasilitasinya kegiatan kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah dan Kepala Daerah				90 %	1,213,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		90 %	1,213,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan				12 bulan	1,949,477,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	1,949,477,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,775,972,500							1,775,972,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya				12 bulan	16,500,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon				90 %	808,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %	808,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah				12 bulan	950,972,500	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	950,972,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						558,450,000						558,450,000		
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan				90 %	558,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		90 %	558,450,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						680,889,114						680,661,572		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH				12 Bulan	180,889,114	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		12 Bulan	180,661,572	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya biaya Medical Check Up KDH dan Wakil KDH				12 Bulan	100,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang bagi kegiatan Operasional KDH dan Wakil KDH				12 Bulan	400,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah						2,645,958,000						2,645,958,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah				90 %	1,193,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %	1,193,258,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah				90 %	1,012,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %	1,012,450,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah				90 %	440,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %	440,250,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi						1,407,946,800						1,800,000,000		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan efisien				80 %	378,938,600			Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		80 %	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tertibnya alur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah				90 %	241,472,000					90 %	325,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai komponen reformasi birokrasi				76 %	287,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		76 %	320,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	OPD yang telah memiliki Standar Pelayanan				80 %	237,129,000			Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		80 %	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemda				80 %	262,817,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				80 %	405,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						902,519,400						959,788,400		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Keprotokolan				1 Kegiatan	319,663,500	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	340,340,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	persentase terlayannya kegiatan KDH/WKDH dan terlayannya komunikasi pimpinan dengan baik				360 kegiatan	273,550,500	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			360 kegiatan	289,146,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase terdokumentasinya kegiatan KDH/WKDH				360 kegiatan	309,305,400	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			360 kegiatan	330,302,400	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	13,199,608,300					100 %	14,111,970,000		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	2,928,970,000					100 %	2,928,970,000		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda				4 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	907,540,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	4 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	907,540,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Bimtek PATEN bagi Aparatur kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Terlaksananya Kegiatan Bimtek Aplikasi SAKTI Terlaksananya Kegiatan Penamaan Rupa Bumi Terlaksananya Penilaian Camat Berprestasi Terlaksananya Penyusunan RanPerbup tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Terlaksannay Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan				13 Kecamatan 12 Bulan 13 Kecamatan 12 Bulan 3 Camat 1 Ranperbup 13 Kecamatan	963,310,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Masyarakat	13 Kecamatan 12 Bulan 13 Kecamatan 12 Bulan 3 Camat 1 Ranperbup 13 Kecamatan	963,310,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Bimtek LKPJ, LPPP dan EPPD Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan EPPD, Penyusunan LKPJ dajn LPPD Tahun 2021 Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM Terlaksananya Pameran APKASI				40 OPD 12 Bulan 8 OPD 2 Kegiatan	1,058,120,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	40 OPD 12 Bulan 8 OPD 2 Kegiatan	1,058,120,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						8,668,235,300							9,275,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	imdek ABS-SBK Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Tahfizh serta Imam dan Gharin Masjid Jumlah Lembaga Didikan Subuh (LDS) Jumlah lembaga keagamaan yang diberi hibah Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Jumlah rumah tahfizh MTQ Tk. Kab. Lima Puluh Kota				1.5 - 3350 orang 14 LDS 90 lembaga 5 kali 16 unit 1 kali	7,506,578,600	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan mutu Pendidikan		1.5 - 3350 orang 14 LDS 90 lembaga 5 kali 16 unit 1 kali	8,150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan rapat yang dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah wirid dan senam pagi yang terselenggara				10 kegiatan 56 sekolah 44 kali	444,791,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 kegiatan 56 sekolah 44 kali	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah jamaah haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya Jumlah masjid/musholaa yang dikunjungi tim safari ramadhan				600 orang 81 masjid/mushalla	716,865,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			600 orang 81 masjid/mushalla	875,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum						796,681,000						950,000,000		
4 01 02 2.03 01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Keputusan Bupati yang ditetapkan Jumlah Rancangan Perbup yang ditetapkan Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan				140 SK 40 Ranperbu 8 Ranperda	397,123,200	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			140 SK 40 Ranperbu 8 Ranperda	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.03 02	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus atau perkara pemerintah daerah yang diberikan bantuan hukum				5 kasus	295,060,800	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 kasus	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dibukukan untuk dapat diakses aparatur dan masyarakat				130 Buku	104,497,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	130 Buku	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah						805,722,000						958,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerja Sama Antar Daerah yang difasilitasi Jumlah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang difasilitasi Jumlah Kesepakatan Bersama yang difasilitasi				10 MoA 6 MoA 4 MoU	405,778,300	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 MoA 6 MoA 4 MoU	408,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama memperoleh bantuan Hibah Jumlah Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri yang difasilitasi Jumlah Penjajakan sister city yang difasilitasi				4 MoU 2 kegiatan 1 MoU	299,943,700	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 MoU 2 kegiatan 1 MoU	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama Jumlah Rapat Evaluasi Kerja Sama				5 buku 4 kegiatan	100,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 buku 4 kegiatan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						3,569,508,100						3,380,540,232		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						745,088,200						742,476,564		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, konsultasi dan pemntauan terhadap BUMD, BLUD				30 lembaga	94,085,400	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik		30 lembaga	95,967,108	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah keikutsertaan Pemda dalam event pameran Jumlah koordinasi dan konsultasi Tim Jumlah Pemantauan Harga Komoditi Yang Beredar				1 kali 6 kali 15 Pemantauan	278,320,700	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	1 kali 6 kali 15 Pemantauan	287,161,314	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantauan pemanfaatan fasilitas dari pemerintah kepada UKM dan Koperasi atau LKM				15 kali	245,880,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	15 kali	246,718,314	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Feasibility studies dalam rangka pelaksanaan pekerjaan				1 BLUD	64,521,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	1 BLUD	56,937,828	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Feasibility studies dalam rangka pelaksanaan pekerjaan				1 BUMD	62,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 BUMD	55,692,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						877,780,700						900,000,000		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perbup tentang Pedum Pelaksanaan Program Renstra Sekretariat Daerah Tersedianya sinkronisasi program pembangunan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota				1 perbup 1 Dokumen 1 dokumen	394,279,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 perbup 1 Dokumen 1 dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan hasil Evaluasi capaian program dan rekapitulasi data kontrak di OPD Tersedianya Laporan Pemantauan Objek Strategis Pembangunan Daerah				12 dokumen 4 dok	253,664,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 dokumen 4 dok	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen/Himpunan Rekapitulasi capaian kemajuan program/ kegiatan SKPD per-bulan Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Terpeliharanya aplikasi pelaporan pelaksanaan RFK berbasis web				96 buku 8 rapat monev 1 aplikasi	229,836,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96 buku 8 rapat monev 1 aplikasi	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1,500,685,800						1,300,725,000		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket pemilihan penyedia barang dan jasa di UKPBJ Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				50 Paket	1,017,756,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	50 Paket	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang mengumukan RUP melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				43 perangkat daerah	158,210,400	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	43 perangkat daerah	225,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang mendapat pembinaan dan advokasi dalam pengadaan barang/jasa Jumlah Nagari yang mendapat pembinaan dan advokasi dalam pengadaan barang/jasa				5 Nagari 5 OPD	324,719,400	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	5 Nagari 5 OPD	325,725,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						445,953,400						437,338,668		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidiBDH-CHT Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantauan, pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta rapat- rapat koordinasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan				13 kecamatan 13 kecamatan 12 kali	279,595,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT			13 kecamatan 13 kecamatan 12 kali	267,653,814	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Feasibility studies dalam rangka kajian pembangkit listrik tenaga angin di kabupaten lima puluh kota Jumlah laporan dalam rangka koordinasi dan konsultasi jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				1 kegiatan 3 laporan 6 kali	88,103,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 3 laporan 6 kali	89,865,060	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantauan terhadap pengelola dan pemanfaatan terhadap minyak bumi dan gas Jumlah laporan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat serta monitoring permasalahan SD, data dan potensi sumber air bersih				6 kali 6 koordinasi	78,254,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 kali 6 koordinasi	79,819,794	SEKRETARIAT DAERAH	
TOTAL							43,505,661,014						47,311,518,476		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lain serta lembaga teknis lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja tentu tidak terlepas dari kesempurnaan. Untuk itu kepada semua pihak yang terkait kami mengharapkan adanya sumbangan pikiran untuk terciptanya Rancangan Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rencana Kerja yang lebih baik dalam mendukung program pembangunan nasional, provinsi dan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan



yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;
- b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 27 November 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 328 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 November 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 27 November 2020



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

24/11/2020